

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara)

Rachmat Luthfi Sulaiman^a, Nashirotn Nisa Nurharjanti^b

^{ab} Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

^althfslmn@gmail.com

^bnnn122@ums.ac.id

Abstract

Financial reports are a medium for an entity, in this case the local government to account for its financial performance to the public. Local governments must be able to present financial reports that contain quality financial information. This study aims to determine the effect of Human Resource Competence, Information Technology Systems, Internal Control Systems and Government Accounting Standards on the Quality of Local Government Financial Reports. While the population in this study were employees of Regional Apparatus Organizations (OPD) in Jepara District. The sample in this study were finance and accounting staff at OPD Jepara District. The research object used was 35 OPD, from 100 respondents who were finance and accounting staff at the Regional Apparatus Organization (OPD) of Jepara District. The results of this study prove that the competence of human resources and government accounting systems have no effect on the quality of financial reports. Meanwhile, information technology systems and internal control systems affect the quality of financial reports.

Keywords: Human Resources Competence; Information Technology System; Internal Control System; Government Accounting Standards; Financial Report Quality.

Abstrak

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Jepara. Sampel dalam penelitian ini adalah staf keuangan dan akuntansi di OPD Kabupaten Jepara. Objek penelitian yang digunakan adalah 35 OPD, dari 100 orang responden yang merupakan staf keuangan dan akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara itu sistem teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia; Sistem Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Intern; Standar Akuntansi Pemerintahan; Kualitas Laporan Keuangan.

1. Pendahuluan

Tata kelola pemerintah yang baik dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam setiap pemerintahan baik pemerintahan pusat ataupun daerah. Perwujudan tata kelola yang baik salah satunya adalah pemerintah memiliki

kualitas laporan keuangan yang baik dalam pengelolaannya. Penelitian sama dilakukan oleh (Maysaroh, 2018), yang menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan

kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang berkualitas adalah dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki haruslah memiliki keempat karakteristik kualitatif diatas sebagai prasyarat normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. (Modo, Saerang, & Poputra, 2016).

Menurut (Sukmaningrum, 2012) laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Suatu informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang disusun oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memahami aturan penyusunan laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas (Ihsanti, 2014). Menurut (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2014) Dalam hal ini adanya Kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh Sistem Teknologi Informasi (STI). Dengan menggunakan STI laporan keuangan dapat menjadi lebih berkualitas karena data telah tersruktur oleh sistem. (Hall, 2009) Sistem informasi merupakan

serangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Teknologi informasi sudah menjadi pilihan utama dalam menciptakan sistem informasi suatu organisasi yang tangguh dan mampu melahirkan keunggulan kompetitif ditengah kemajuan teknologi pada saat ini, instansi-instansi pemerintah sudah mulai meninggalkan sistem manual, beralih ke sistem komputer. (Modo et al., 2016). Agar tercipta kinerja pemerintah yang baik, dilakukan upaya dengan menerapkan aplikasi tentang pengelolaan keuangan pemerintahan pusat maupun daerah.

Aspek lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingginya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internalnya. Jika pengendalian internal lemah, maka akan sulit mendeteksi kecurangan proses akuntansi sehingga dapat menyebabkan bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. (Dewi, Purnamawati, & Herawati, 2017). Penelitian sama dilakukan oleh (Untary, 2015) Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan SPI mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi, dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga perlu dilakukan untuk laporan keuangan menjadi berkualitas. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan untuk memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Penelitian (Adhi & Suhardjo, 2013) menyebutkan bahwa penerapan SAP mewajibkan setiap entitas

pelaporan, yang dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antara generasi dan evaluasi kinerja. Melalui penerapan SAP akan dapat disusun laporan keuangan yang useful. Kegunaan laporan keuangan ditentukan oleh isi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Agar laporan keuangan berisi informasi yang bermakna maka laporan keuangan harus disusun berpedoman pada SAP.

Jum'at (21/05/2021) SEMARANG- Pemerintah Kabupaten Jepara kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), atas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Pencapaian tersebut merupakan kali kesebelas yang didapat Kota Ukir secara berturut-turut. (<https://jatengprov.go.id/beritadaerah/kabupate-n-jepara-raih-opini-wtp-kesebelas/>)

Fenomena diatas menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah tersebut dapat memperoleh penghargaan opini WTP atas LKPD-nya.

Obyek penelitian ini adalah karyawan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara mempunyai julukan Kota Ukir, dimana hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan daerah yang cukup signifikan sehingga pengelolaan laporan keuangan daerahnya harus dilakukan dengan akuntabel.

2. Kajian Literatur

2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dalam suatu periode tertentu. Nurillah (2014) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. (Sukmaningrum, 2012) menyatakan laporan keuangan juga mempunyai tujuan umum yaitu peranan prediktif dan prospektif,

menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dihasilkan dari dan untuk operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

2.2 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman dan pelatihan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes) (Nurillah, 2014). Manusia bertanggung jawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Hullah & Pontoh, 2017).

2.3 Sistem Teknologi Informasi

Sistem Teknologi informasi bisa diartikan sebagai suatu teknologi yang dipakai untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data pada berbagai cara untuk membuat informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dipakai untuk keperluan pribadi, bisnis, dan Pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Menurut (Hartono, 1995), teknologi merupakan alat yang digunakan individual dalam penyelesaian tugas mereka, dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer (perangkat keras, perangkat lunak, data) dan penggunaan jasa pendukung (training) yang memberikan panduan penggunaan dalam menyelesaikan tugas.

2.4 Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern secara ringkas yaitu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai

tujuan dan sasarannya. (Rai, 2008). Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.5 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan Keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan (Zeyn, 2011)

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek (satuan-satuan / individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Jepara. Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari populasi. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode *proportional stratified random sampling*. *Proportional stratified random sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan cara mengambil sampel dari populasi secara acak dan terstrata secara proporsional (Sugiyono, 2007). Sampel dalam penelitian ini adalah staf keuangan dan akuntansi di OPD Kabupaten Jepara. OPD yang diteliti adalah 35 OPD dengan menggunakan 100 orang responden yang merupakan staf keuangan dan akuntansi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan melalui google formulir. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

3.3 Teknik Analisis Data

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Analisis regresi linear berganda yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KLK = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 STI + \beta_3 SPI + \beta_4 SAP + \varepsilon$$

Keterangan:

KLK : Kualitas Laporan Keuangan

KSDM : Kompetensi Sumber Daya Manusia

STI : Sistem Teknologi Informasi

SPI : Sistem Pengendalian Intern

SAP : Standar Akuntansi

Pemerintahan

α : Konstanta

β : Koefisien Regresi

ε : Error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi linier berganda dalam penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 1

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	B	Std Error	t _{hitung}	Sig
(Constant)	0,714	1,681	0,425	0,672
KSDM	-0,024	0,065	-0,374	0,709
STI	0,437	0,089	4,889	0,000
SPI	0,600	0,058	10,381	0,000
SAP	-0,097	0,056	-1,721	0,090
Rsquare	= 0,896		F _{hitung}	=
			140,563	
Adjusted R Square	= 0,890		sig	= 0,000

Sumber : Data primer diolah penulis, 2021

Adapun persamaan regresi sebagai berikut :

$$KLK = 0,714 - 0,024(KSDM) + 0,437(STI) + 0,600(SPI) - 0,097(SAP) + e$$

Pengujian Hipotesis:

- 1 Secara statistik konstanta sebesar 0,714 dengan parameter positif menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, sistem

pengendalian intern dan sistem akuntansi pemerintah naik maka kualitas laporan keuangan akan meningkat.

- 2 Secara statistik koefisien regresi kompetensi sumber daya manusia menunjukkan koefisien yang negatif yaitu sebesar -0,024 dengan demikian dapat diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia menurunkan kualitas laporan keuangan.
- 3 Secara statistik koefisien regresi sistem teknologi informasi menunjukkan koefisien yang positif yaitu sebesar 0,437 dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 4 Secara statistik koefisien regresi sistem pengendalian intern menunjukkan koefisien yang positif yaitu sebesar 0,600 dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem pengendalian intern mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- 5 Secara statistik koefisien regresi sistem akuntansi pemerintahan menunjukkan koefisien yang negatif yaitu sebesar -0,097 dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem akuntansi pemerintahan mampu menurunkan kualitas laporan keuangan.

4.2 Uji F

Untuk menguji signifikansi (keberartian) koefisien korelasi ganda harus digunakan uji F. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Uji F test

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1019.061	4	254.765	140.563	.000
Residual	117.810	65	1.812		
Total	1136.871	69			

Secara statistik hasil uji F test diperoleh F_{hitung} sebesar 140,563 dan $F_{tabel} = 2,76$. Apabila membandingkan F_{hitung} dengan nilai F_{tabel} dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $140,563 > 2,76$. Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikansi sebesar $(0,000) < 0,05$, hal ini yang berarti variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan,

sehingga model penelitian yang digunakan adalah *goodness of fit*.

4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,947	0,896	0,890	1,34628

Sumber : Data primer diolah penulis, 2021

Secara statistik hasil perhitungan untuk nilai R^2 diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- R^2 sebesar 0,890. Hal ini berarti bahwa 89% variasi variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, sistem teknologi informasi, sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi pemerintah sedangkan sisanya yaitu 11% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

4.4 Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan tingkat pengaruh pada satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil dari pengujian uji t yang dijabarkan pada tabel IV.13 yang menunjukkan sebagai berikut:

- a. Hasil Uji Hipotesis Pertama (H_1)
Berdasarkan uji t variabel kompetensi sumber daya manusia diketahui nilai t_{hitung} sebesar -0,374 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha : 0,05$) adalah 2,002 karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar $0,709 > 0,05$, dengan demikian H_1 yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Dapat diartikan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Hasil Uji Hipotesis Kedua (H_2)
Berdasarkan uji t variabel sistem teknologi informasi diketahui nilai t_{hitung} sebesar 4,889 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha : 0,05$) adalah 2,002 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan

nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_2 yang menyatakan bahwa sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Dapat diartikan bahwa sistem teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

- c. Hasil Uji Hipotesis Ketiga (H_3)
Berdasarkan uji t variabel sistem pengendalian intern diketahui nilai t_{hitung} sebesar 10,381 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha : 0,05$) adalah 2,002 karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, dengan demikian H_3 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Dapat diartikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- d. Hasil Uji Hipotesis Keempat (H_4)
Berdasarkan uji t variabel sistem akuntansi pemerintahan diketahui nilai t_{hitung} sebesar -1,721 sedangkan besarnya nilai t_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% atau ($\alpha : 0,05$) adalah -2,002 karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikan sebesar $0,090 > 0,05$, dengan demikian H_4 yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ditolak. Dapat diartikan bahwa sistem akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

4.5 Pembahasan

Hipotesis 1

Variabel kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (-0,374) lebih kecil daripada t_{tabel} (2,002) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,709 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_1 ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rika Syahadatina dan Ismiatika Fitriyana (2016) yang menyatakan "Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan cermat, akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun selain itu terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti masalah kurangnya pendidikan dan sistem pengendalian internal." sehingga

kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penelitian ini tidak mendukung penelitian As Syifa Nurillah (2014), Kadek Deisana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014), Nurendah Ragillita Untary dan Moh Didik Ardiyanto (2015), Nur Laila Yuliani dan Rahmawati Dwi Agustini (2016) dan Katin Wilda Maysaroh (2018) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis 2

Sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (4,889) lebih besar daripada t_{tabel} (2,002) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_2 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurillah dan Muid (2014), As Syifa Nurillah (2014), Kadek Deisana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014), Nurendah Ragillita Untary dan Moh Didik Ardiyanto (2015), Nur Laila Yuliani dan Rahmawati Dwi Agustini (2016) dan Katin Wilda Maysaroh (2018) yang menyatakan "Dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan." sehingga sistem teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis 3

Variabel sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dibuktikan dengan nilai t_{hitung} (10,381) lebih besar daripada t_{tabel} (2,002) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H_3 diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurillah dan Muid (2014), Sundari dan Rahayu (2019) yang menyatakan "Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik, maka laporan keuangan pemerintah daerah akan dapat memenuhi karakteristik / nilai informasi yang disyaratkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah ini agar mendapatkan

opini yang baik dan tanpa kecuali.” sehingga sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis 4

Variabel sistem akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dibuktikan dengan nilai thitung (-1,721) lebih kecil daripada ttabel (2,002) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,090 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu H4 ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian As Syifa Nurillah (2014) dan Kadek Deisana Wati, Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014) yang menyatakan “Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.” sehingga sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

- (1) Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- (2) Sistem Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- (3) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Jepara.
- (4) Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- (1) Peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel guna memaksimalkan penelitiannya agar dapat lebih mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
- (2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah lainnya agar dapat

menjadi perbandingan untuk penelitian yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *STIE Semarang*, 5(3), 95–111.
- Dewi, L. D. S., Purnamawati, I. G. A., & Herawati, N. T. (2017). Penerapan Sap Berbasis Akrua (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Bangli). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–11.
- Hartono, J. (1995). Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis). *Andi*. <https://doi.org/10.1177/031289629101600103>
- Hullah, A. R., & Pontoh, W. (2017). Analisis Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, 6(1), 65–71. <https://doi.org/10.32400/ja.16028.6.1.2017.65-71>
- Ihsanti, E. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *Skripsi Universitas Negeri Padang*.
- Maysaroh, K. W. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah pada SKPD)*. 1–17.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 7(2), 14–30. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13550>
- Nurillah, A. S. (2014). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas*

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)*. 1–70.
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=duY317kfkXoC>
- Sukmaningrum, T. (2012). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Semarang. *Skripsi Universitas Diponegoro*, 1–71.
- Untary, N. R. (2015). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Faktor Eksternal Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang). *Skripsi Universitas Diponegoro*, 1–73.
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21–37.